BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR 31.6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah bebera kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Manggarai Timur Nomor 103);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 171);
12. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupten Manggarai Timur Tahun 2023 Nomor 007).
13. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang di capai PD untuk Periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
13. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan, dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD beserta Matrik Program Prioritas PD Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir 31 Desember 2025.

(2) Renja PD Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Renstra PD Tahun 2025–2026.

(3) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
   a. Salah satu bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara, khususnya program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025; dan
   b. Bahan bagi PD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran Tahun 2025, setelah tercantum dalam KUA/PPAS.

(4) Penyusunan Renja PD merupakan tahapan lanjutan dari Penetapan RKPD.

(5) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilakukan verifikasi kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Target dengan RKPD Tahun 2025.

(6) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Renja PD disusun dengan sistimatika sebagai berikut :
   a. Bab I Pendahuluan ;
   b. Bab II Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu ;
   c. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
   d. Bab IV Rencana kerja dan Pendanaan PD ; dan
   e. Bab V Penutup.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
   a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar:
      1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ;
      2. Dinas Kesehatan ;
      3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
      4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
      5. Satuan Polisi Pamong Praja ;
      6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
      7. Dinas Sosial.
   b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
      1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
      2. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
      3. Dinas Pangan dan Perikanan ;
      4. Dinas Pertanahan ;
      5. Dinas Lingkungan Hidup ;
      6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
      8. Dinas Perhubungan ;
      9. Dinas Komunikasi dan Informatika ;
      10. Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah ;
      11. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; dan
      12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

c. Urusan Pilihan
   1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
   2. Dinas Pertanian ; dan
   3. Dinas Peternakan.

d. Urusan Pendukung
   1. Sekretariat Daerah terdiri dari :
      a) Bagian Umum ;
      b) Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan ;
      c) Bagian Hukum ;
      d) Bagian Humas dan Komunikasi Pimpinan ;
      e) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
      f) Bagian Organisasi ; dan
      g) Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

e. Urusan Penunjang
   1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
   2. Badan Keuangan Daerah ; dan
   3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

f. Urusan Pengawasan, yaitu Inspektorat Daerah.

g. Urusan Kewilayaan
   1. Kecamatan Borong ;
   2. Kecamatan Elar Selatan ;
   3. Kecamatan Sambi Rampas ;
   4. Kecamatan Congkar ;
   5. Kecamatan Rana Mese ;
   6. Kecamatan Lamba Leda Selatan ;
   7. Kecamatan Kota Komba ;
   8. Kecamatan Elar ;
   9. Kecamatan Kota Komba Utara ;
   10. Kecamatan Lamba Leda Timur ;
   11. Kecamatan Lamba Leda ; dan
   12. Kecamatan Lamba Leda Utara.

(3) Isi beserta uraian Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan urutan berdasarkan PD menurut urusan wajib dan pilihan ;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 8 Juli 2024
Pj. BUPATI MANGGARAI TIMUR,

BONI HASUDUNGAN

Diundangkan di Borong
pada tanggal 8 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

REMIGIUS GONSA TOMBOR

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurna a n Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstraPerangkat Daerah kabupaten/ko	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			.
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			

10 d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			

Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten
Manggarai Timur

Petrus Subin,SKM
Pembina TK.1,IV/B
NIP. 19711111020003 1 011

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
BORONG

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : BPBD.360/ /VII/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menimbang : a. Bahwa untuk menyusun dokumen resmi yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, indicator program, kegiatan, indicator kegiatan dan acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rakyat dalam mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan sebagai tolak ukur capaian kinerja untuk Rencana Strategis 2 (dua) tahun kedepan maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2025;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 157;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 adalah :

1. Menelaah Visi dan Misi Kepala Daerah,
2. Menelaah Dokumen RPJMD,

3. Menelaah Dokumen Renstra Organisasi Perangkat Daerah,

7. Menganalisis gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),

8. Merumuskan isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan indicator kinerja sasaran, program, indikator program, kegiatan dan indicator kegiatan,

9. Mengolah data dan informasi,

10. Memverifikasi keterkaitan rancangan Rencana Kerja (Renja) dengan dokumen Renstra,

11. Menyempurnakan rancangan Rencana Kerja (Renja),

12. Memverifikasi rancangan akhir Rencana Kerja (Renja),

13. Menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Rencana Kerja (Renja).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Borong

pada tanggal, 2024

Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten
Manggarai Timur

Petrus Subin,SKM
Pembina TK.I,IV/B
NIP. 19711102000 3 1 011

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR : BPBD.360/ /VII/ 2024

TANGGAL : 2024

TENTANG : TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025

No	Jabatan Dalam Tugas	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Pelaksana	PenanggungJawab
2	Sekretaris Pelaksana	Ketua
3	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Anggota
5	Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik	Anggota
6	Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	Anggota
7	Analis Kebencanaan Ahli Muda	Anggota
8	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Anggota
9	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Anggota
10	Analisis Kebencanaan	Anggota

Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten
Manggarai Timur

Petrus Subin,SKM
Pembina TK.I,IV/B
NIP. 19711111020003 1 011

Pembina

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2025 adalah Dokumen perencanaan pembagunan yang di susun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur, serta Rencana Strategis Transisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Manggarai Timur tahun 2025-2026 Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD kabupaten Manggarai Timur.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2025 merupakan dasar atau pedoman bagi Rencana Kerja Tahun Keenem atas pelaksanaan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025-2026 menjadi bahan materi musyawarah perencanaan pembagunan Kabupaten Manggarai Timur guna menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta menjadi acuan dan pedoman bagi Peyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 dan Rencana APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembagunan yang direncanakan pada tahun 2025 berdasarkan hasil Forum Satuan Organisasi Kerja Perangkat Daerah (forum OPD) atau gabungan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Penggulagan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 Ingin mengakomasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembagunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, serta memperhatikan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Semoga dokumen penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 ini, dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan kepada semua pihak yang telah berperan dalam peyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya Korektif dari semua Pihak senantiasa diharapkan demi penyempurnaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada masa yang akan datang khususnya bagi peningkatan Kualitas pelayanan public.

Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten
Manggarai Timur

Petrus Subin,SKM
Pembina TK.I,IV/B
NIP. 19711102003 1 011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU..... 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 5
2.2. Analisis Kinerja pelayanan OPD 27
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 30
2.4. Review Tahapan Rencana Awal RKPD 33
2.5. penelahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 43

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN 47

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 47
3.2. Tujuan dan Sasaran renja OPD..... 48
3.3. program dan Kegiatan 48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 55

BAB V PENUTUP 68

LAMPIRAN : Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

Daftar Tabel

Tabel TC 29	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)	6
Tabel TC 30	:	Capaian Kinerja Perangkat Daerah	29
Tabel TC 31	:	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024	34
Tabel TC 32	:	Penelahaan Usulan Program/Kegiatan Masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	44
Tabel TC 33	:	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	51
Tabel	:	Rumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yang berisikan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiran maju, yang disusun dengan mengacu pada RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk satu tahun anggaran. Renja kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acauan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di dalam Renja kerja tersebut ditetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, apa yang hendak dicapai pada masa satu tahun, serta bagaimana cara mencapainya.

Dengan demikian, Renja kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur merupakan satu dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun anggaran 2024 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya dan kualitas penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan sangat menentukan kualitas rencana daerah di atasnya, termasuk keterpaduan rencana dan anggaran. Rencana Kerja ini merupakan bagian dari proses perencanaan dalam rangka terwujudnya pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur yang lebih sistematis, terarah, komprehensif, terintegrasi, sinergi dan berkesinambungan.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dengan mengacu pada Visi Misi Bupati yang termuat dalam RPJMD 2019-2024 dan sesuai Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Indikator yang ditetapkan dalam Rencana Kerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renja SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang –undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2025;

7. Peraturan Pemerintah No.65 Nomor 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentanng Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019-2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 35 Tahun 2009 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
12. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 25 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 – 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud penyusunan rencana kerja (Renja) Tahun 2024 ini adalah memberi gambaran mengenai program / kegiatan prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam kerangka RPJMD Kabupaten Manggarai Timur.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 dapat lebih terukur dan efektif.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Renja Perangkat
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Secara umum realisasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 sudah berjalan sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun realisasi belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun anggaran 2023 dan perkiraan pelaksanaan DPA tahun berjalan (tahun 2024) yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi akan tergambarkan pada uraian table TC.29 sebagai berikut:

Tabel TC 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Manggarai Timur

No	Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indicator kinerja program (outcome)/kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Pogram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d/ Tahun Berjalan	
						Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian RealisasiTarget RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kesiagaan Terhadap Resiko bencana			Indeks Ketahanan Daerah	0,55 poin	0,45 poin	0,45 poin	0,45 poin	100%	0,50 poin	0,47 poin	50 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan**								

			Daerah Kabupaten / Kota								
		Perencanaan Penganggaran ,Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Presentase Ketersediaan data dan informasi Sektoral Urusan Perangkat Daerah**								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60
			Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	5 dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60
			Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	5 dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60
		koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar dan realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan LPPD, LAKIP, LKPJ, Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan	30 laporan		6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	60
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60
			Jumlah Laporan Pelaksanaan dan			1 Dokumen	1	100%	1	1	60

			Evaluasi Hasil Renja				Dokumen		Dokumen	Dokumen	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Presentasi Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	95 orang		19 Orang	19 Orang	100%	19 Orang	19 Orang	60
		Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	15 laporan		3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	60
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Presentase Pencapaian Administrasi Barang Milik daerah pada perangkat daerah**								
		Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen KIB,KIR dan Kodefikasi seluruh BMD pada SKPD	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	60
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat**								

			Daerah								
		Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	60 bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60
		Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	60 bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60
			jumlah barang penggandaan	60 bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60
		Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	60 bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Kali		20 Kali	20 Kali	100%	20 Kali	20 Kali	60
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Presentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	550 surat		110 Surat	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60
		Penyediaan jasa komonikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60

		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	60 bulan		24 OB	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60
		Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		_	100%	100%	100%			
		Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	9 unit		3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	60
		Pemeliiharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	60 bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60
		Program penanggulangan bencana	**Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**			100%	70,01%	100%	100%	70,01%	70,01 %
			Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			100%	70,01%	100%	100%	70,01%	70,01 %
			Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%

			penyelamatan dan evakuasi korban bencana								
		Pelayanan informasi Rawan Bencana kabupaten/Kota	**Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legas**			100%	100%	100%			
			Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang mepperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana			100%	100%	100%			
		Sosialiasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis bencana)	Jumlah warga Negara yang mendapat sosialisasi dan informasi bencana	500 orang (10 sekolah)		150 orang (2 sekolah)	150 orang (2 sekolah)	100%	100 orang (2 sekolah)	100 orang (2 sekolah)	60
		Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan tehadap Bencana	**Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legas**			100%	100%	100%			
			Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legas			100%	100%	100%			
			Persentase jumlah apartur dan warga negara yang ikut pelatihan			100%	100%	100%			

			Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan			100%	100%	100%			
			Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarpras penanggulangan bencana			100%	100%	100%			
			Persentase jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan			100%	100%	100%			
		Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Desa/Kel.Tangguh Bencana	10 desa/kelurahan		1 Desa/ Kelurahan	-	-	1 Desa/ Kelurahan	1 Desa/ Kelurahan	10
		Penanganan pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah data sektoral	5 dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana kontigensi (Renkon)			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
		Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus KLB**			100%	100%	100%			

			Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus darurat bencana			100%	100%	100%			
			persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana			100%	100%	100%			
			Persentase jumlah korban berhasil dicari,ditolong dan di evakuasi tehadap kejadian bencana			100%	100%	100%			
		Aktrivasi sistim komando penanganan darurat bencana	Jumlah petugas aktif penanganan bencana	180 orang		36 Orang	36 Orang	100%	36 Orang	36 Orang	60
		Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana	**Persentase koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca bencana**			12 Bulan	12 Bulan	100%			
		kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan Bencana kabupaten/kota	jumlah koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca bencana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100

a. Realisasi program kegiatan tahun anggaran 2022 rata-rata memenuhi target kinerja hasil/keluaran dengan target Indikator Kinerja Utama sebesar 0,45 poin realisasi 0,45 poin (100%), sedangkan rata-rata capaian kinerja program/kegiatan sebesar :97%.
b. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan
c. Faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja perangkat daerah :
    - Terintergrasinya dokumen perencanaan sampai dengan tahapan pelaksanaan.
    - Kerjasama antar bidang dalam merumuskan data program/kegiatan/sub kegiatan.
    - Dukungan semua personil baik internal maupun eksternal dalam menjalankan program/kegiatan.

d. Faktor-faktor penghambat keberhasilan kinerja perangkat daerah
    - Perlu adanya dukungan alokasi anggaran untuk sistem informasi peringatan dini melalui pemasangan papan informasi rambu kebencanaan pada titik-titik rawan bencana.
    - Perlu adanya dukungan alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan, mitigasi dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
    - Perlu adanya dukungan alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan, mitigasi dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana.
    - Perlu adanya dukungan alokasi anggaran penyediaan logistik untuk korban bencana.
    - Perlu ditingkatkan lagi kerjasama intas sektoral dalam penanggulangan bencana baik antara instansi pemerintah maupun non pemerintah.
    - Perlu adanya dukungan alokasi anggaran untuk biaya mobilisasi saat proses pencarian dan evakuasi saat bencana.Terintergrasinya dokumen perencanaan sampai dengan tahapan pelaksanaan.
    - Kerjasama antar bidang dalam merumuskan data program/kegiatan/sub kegiatan.

- Dukungan semua personil baik internal maupun eksternal dalam menjalankan program/kegiatan.

e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu dimbil untuk memaksimalalkan lagi pelayanan kebencanaan :
   - Perlu adanya dukungan tambahan anggaran untuk kebutuhan logistic kebencanaan.
   - Perlu adanya tambahan sumber daya peralatan kebencanaan
   - Perlu adanya dukungan sumber daya manusia dibidang kebencanaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Penetapan kinerja didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 adalah: "***Indeks Ketahanan Daerah"*** dan rumusan pengukurannya dilakukan oleh Perangkat Daerah sendiri.

Formulasi pengukuran Indikator kinerja utama ***"Indeks Ketahanan Daerah"*** didasari pada 7 (tujuh) point peningkatan indeks kapasitas di Kabupaten/Kota yaitu :

a. Penguatan kebijakan dan kelembagaan
b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan terpadu
c. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistic
d. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
e. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana
f. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
g. Pengembangan sistem pemulihan bencana

Selanjutnya formulasi pengukuran diatas dijabarkan dalam program/kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan indicator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ManggaraiTimur.

Tabel T-C.30
Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
SKPD :BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indeks Ketahanan Daerah			0,40 poin	0,45 poin	0,50 poin	0,55 poin	0,40 poin	0,45 poin	0,50 poin	0,55 poin	
a.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana			100%	100%	100%	100%	70,01%	70,07%	100%	100%	
b.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			100%	100%	100%	100%	70,01%	70,01%	100%	100%	

c.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi.Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government.

Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai arah kebijakan dari pemerintah dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana, diantaranya :

1. Fase Pra Bencana :Pembagian petugas BPBD yang ditempatkan di setiap Kecamatan berdasarkan potensi rawan bencana.
2. Fase Tanggap Darurat :Penanganan tanggap darurat pada saat terjadi bencana.
3. Fase Pasca Bencana :koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca bencana lintas sector.

Permasalahan dan hambatan yang dialami BPBD dalam menyelenggarakan¬ tugas dan fungsi diantaranya :

1. Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai berikut :

a. Kondisi geografis Kabupaten Manggarai Timur yang rawan akan bencana alam (gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran dll)
b. Kondisi bangunan rumah penduduk dan sarana Pemerintahan banyak yang rusak dan tidak memadai. Hal ini sangat membahayakan bila terjadi bencana;
c. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana;
d. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;
e. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam; dan
f. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.

2. Permasalahan Bidang Penanganan pada saat terjadi bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang ketanggapdaruratan dan logistik sebagai berikut :

a. Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
b. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
c. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan

e. Belum memiliki SOP (Standar Operational Prosedur) Penanggulangan Bencana

3. Permasalahan Bidang Penanganan Pasca / setelah terjadi bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut:

a. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
b. Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang tidak akurat;
c. Keterbatasan peta wilayah yang meyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
d. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugianserta perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terpusat;
e. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang berasal dari anggaran daerah.

Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah, terhadap capaian¬ program nasional/internasional :

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana,
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada,
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh,
4. Membangun pasrtisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
5. Mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.
6. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun Tantangan yang dihadapi BPBD dalam meningkatkan pelayanan:

1. Kondisi Geografis Kabupaten Manggarai Timur;
2. Keterbatasan dana;
3. Keterbatasan kualitas personil lembaga;
4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

Peluang BPBD dalam meningkatkan pelayanan:

1. Dukungan undang-undang.
2. Pengalaman melaksanakan program penanggulangan bencana.

Formulasi isu-isu penting

1. Penanganan Bencana bisa tersebar sampai kepada kelompok masyarakat terkecil
2. Adanya Standar operasional prosedur penanggulangan bencana.
3. Sistem informasi yang terkoneksi ke seluruh wilayah rawan bencana.
4. Koordinasi lintas sektoral yang efektif dalam penanggulangan bencana.
5. Sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada sub bagian ini didijelaskan tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/kegiatan /Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (%)	Program/kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.267.502.917			**2.267.502.917**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				2.267.502.917			**2.267.502.917**		
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		**Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 Persen	1.967.704.317	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		**Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 Persen	1.967.704.317

	DAERAH		**Kabupaten/Kota**			**DAERAH**		**Kabupaten/Kota**		
	Perencanaan Penganggaran ,Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Presentase Ketersediaan data dan informasi Sektoral Urusan Perangkat Daerah**	100 persen	10.999.600	**Perencanaan Penganggaran ,Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Presentase Ketersediaan data dan informasi Sektoral Urusan Perangkat Daerah**	100 persen	10.999.600
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan/Kabupaten	• Jumlah Dokumen pelaksanaan forum Perangkat daerah • Jumlah dokumen renja perangkat daerah	4 Dokumen	7.499.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan/Kabupaten	• Jumlah Dokumen pelaksanaan forum Perangkat daerah • Jumlah dokumen renja perangkat daerah	4 Dokumen	7.499.700
	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar dan realisasi kinerja SKPD	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah laporan Lakip, LKPJ dan LPPD	4 Laporan	1.999.900	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar dan realisasi kinerja SKPD	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah laporan Lakip, LKPJ dan LPPD	4 Laporan	1.999.900
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah laporan pelaksanaan dan evaluasi hasil renja	4 Laporan	1.500.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah laporan pelaksanaan dan evaluasi hasil renja	4 Laporan	1.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 persen	1.713.205.817	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			100 persen	1.713.205.817
	Penyediaan Gaji dan	Semua	Jumlah ketercapaian			Penyediaan Gaji dan	Semua	Jumlah ketercapaian		

	Tunjangan ASN	Kecamatan/Kabupaten	penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten	16 Orang/bulan	1.570.446.067	Tunjangan ASN	Kecamatan/Kabupaten	penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten	16 Orang/bulan	1.570.446.067
	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	10 Dokumen	140.259.900	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	10 Dokumen	140.259.900
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 Laporan	2.499.850	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 Laporan	2.499.850
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			100 persen	1.499.850	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**			100 persen	1.499.850
	Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah dokumen KIB, KIR dan kodefikasi seluruh BMD pada SKPD	4 laporan	1.499.850	Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah dokumen KIB, KIR dan kodefikasi seluruh BMD pada SKPD	4 laporan	1.499.850
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 persen	78.999.550	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			100 persen	78.999.550
	Penyediaan bahan	Semua	Jumlah bahan logistic			Penyediaan bahan	Semua	Jumlah bahan logistic		

	Logistik Kantor	Kecamatan/Kabupaten	kantor	50 Paket	7.000.000	Logistik Kantor	Kecamatan/Kabupaten	kantor	50 Paket	7.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah barang cetakan dan penggandan	50 Paket	6.999.800	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah barang cetakan dan penggandan	50 Paket	6.999.800
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	30 Laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	30 Laporan	5.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD	20 Laporan	59.999.750	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD	20 Laporan	59.999.750
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100 persen	7.999.600	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**			100 persen	7.999.600
	Penyediaan jasa surat menyurat	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah surat masuk dan surat keluar	10 Laporan	999.800	Penyediaan jasa surat menyurat	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah surat masuk dan surat keluar	10 Laporan	999.800
	Penyediaan jasa komonikasi,sumber daya air dan listrik	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	5.000.000	Penyediaan jasa komonikasi,sumber daya air dan listrik	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	5.000.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4 Laporan	1.999.800	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4 Laporan	1.999.800

	Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah			100 persen	154.999.900	**Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah**			100 persen	154.999.900
	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas operasional/lapangan	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional/lapangan	4 Unit	154.999.900	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas operasional/lapangan	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional/lapangan	4 Unit	154.999.900
	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan perizinan alat berat	1 unit	74.999.950	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan perizinan alat berat	1 unit	74.999.950
B.	**Program penanggulangan bencana**			100 persen 100 persen 100 persen	299.798.600	**Program penanggulangan bencana**			100 persen 100 persen 100 persen	299.798.600
	Pelayanan informasi Rawan Bencana			100 persen 100 persen	21.499.700	**Pelayanan informasi Rawan Bencana**			100 persen 100 persen	21.499.700

	kabupaten/Kota					**kabupaten/Kota**				
	Sosialiasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis bencana)	Siswa/i SMAN 4 Borong Kel.Kota Ndora Kec.borong	Jumlah warga Negara yang diberikan sosialisasi dan gladi pengurangan resiko bencana	75 Orang	21.499.700	Sosialiasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis bencana)	Siswa/i SMAN 4 Borong Kel.Kota Ndora Kec.borong	Jumlah warga Negara yang diberikan sosialisasi dan gladi pengurangan resiko bencana	75 Orang	21.499.700
	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan tehadap Bencana			100 persen 100 persen	99.999.750	**Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan tehadap Bencana**			100 persen 100 persen	99.999.750
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Siswa/i SMAN 1 Kota Komba, SMAN 1 Poco Ranaka, SMAN1 Sambi Rampas, SMAN 1 Elar - Kab. Manggarai Timur, Poco Ranaka, Mandosawu - Kab. Manggarai Timur, Sambi Rampas, Satar Nawang - Kab. Manggarai Timur, Elar, Tiwu Kondo Kab. Manggarai Timur, Kota Komba,	***Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana***	4 Kawasan	99.999.750		Siswa/i SMAN 1 Kota Komba, SMAN 1 Poco Ranaka, SMAN1 Sambi Rampas, SMAN 1 Elar - Kab. Manggarai Timur, Poco Ranaka, Mandosawu - Kab. Manggarai Timur, Sambi Rampas, Satar Nawang - Kab.	***Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana***	4 Kawasan	99.999.750

		Watu Nggene					Manggarai Timur, Elar, TiwuKondo Kab. Manggarai Timur, Kota Komba, Watu Nggene			
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana		*Persentase jumlah korban berhasil dicari,ditolong dan dievakuasi tehadap kejadian bencana Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jamuntuk setiap kasus daruratbencana Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jamuntuk setiap kasus KLB*	100 persen 100 persen 100 persen	141.299.450	**Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana**		*Persentase jumlah korban berhasil dicari,ditolong dan dievakuasi tehadap kejadian bencana Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jamuntuk setiap kasus daruratbencana Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jamuntuk setiap kasus KLB*	100 persen 100 persen 100 persen	141.299.450
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan/Kabupaten	***Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat***	15 Dokumen	49.999.800		Semua Kecamatan/Kabupaten	***Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat***	15 Dokumen	49.999.800
	Pencarian, Pertolongan dan	Semua Kecamatan/Kabupaten	***Jumlah Korban yang BerhasilDitemukan,***	15 Orang	6.299.850		Semua Kecamatan/Kabu	***Jumlah Korban yang BerhasilDitemukan,***	15 orang	6.299.850

	Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		***Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana***				paten	***Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana***		
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan/Kabupaten	***Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan DistribusiLogistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	25 Orang	35.000.000		Semua Kecamatan/Kabupaten	***Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan DistribusiLogistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	25 orang	35.000.000
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Semua Kecamatan/Kabupaten	***Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu***	15 Dokumen	49.999.800		Semua Kecamatan/Kabupaten	***Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu***	15 dokumen	49.999.800
	Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana			100 persen 100 persen	36.999.700	**Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana**			100 persen 100 persen	36.999.700
	kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam	Semua Kecamatan/Kabupaten	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penanganan	6 Dokumen	16.999.800	kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam	Semua Kecamatan/Kabupaten	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penanganan	6 Dokumen	

	penanggulangan Bencana kabupaten/kota		pasca bencana			penanggulangan Bencana kabupaten/kota		pasca bencana		
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	3 Kegiatan	19.999.900	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan/Kabupaten	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	3 Kegiatan	19.999.900

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dan Penelahaan Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD

a. Pada tahapan musrembang dalam rangka mengakomodir usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan baik masyarakat maupun pokir DPRD
b. Hasil penelahaan usulan dari para pemangku kepentingan terkait perbaikan rehabilitasi/rekonstruksi fasilitas sarana dan prasarana umum dapat kami sampaikan bahwa usulan-usulan tersebut kami arahkan untuk diteruskan untuk ditangani oleh OPD teknis terkait, karna sesuai dengan Tupoksi BPBD yang hanya melakukan fungsi koordinasi dengan stakeholder terkait.
c. Penyajian Tabel T-C.32 pada perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah hanya menyajikan Program/kegiatan yang nantinya bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Tabel T-C.32
Penelahaan Usulan Masyarakat dan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	3	4	5	6
Program penanggulangan bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen 100 Persen 100 Persen	299.798.600
Pelayanan informasi Rawan Bencana kabupaten/Kota		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan	100 persen 100 persen	21.499.700
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Siswa/i SMAN 4 Borong	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	75 Orang	21.499.700
Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan		Persentase jumlah aparatur yang ikut pelatihan. Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan	100 persen 100 persen	99.999.750

tehadap Bencana				
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Siswa/i SMAN 1 Kota Komba, SMAN 1 Poco Ranaka, SMAN1 Sambi Rampas, SMAN 1 Elar	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	4 Kawasan	99.999.750
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Persentase jumlah korban berhasil dicari,ditolong dan di evakuasi tehadap kejadian bencana Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus darurat bencana Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus KLB	100 persen 100 persen 100 persen	141.299.450
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Manggarai Timur	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	15 Dokumen	49.999.800
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Manggarai Timur	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	15 Orang	6.299.850
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Manggarai Timur	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	25 Orang	35.000.000
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kabupaten Manggarai Timur	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	15 Dokumen	49.999.800

Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Persentase koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca bencana	100 persen 100 persen	36.999.700
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Manggarai Timur	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	6 Dokumen	16.999.800
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Manggarai Timur	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	3 Kegiatan	19.999.900

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahan terhadap Kebijakan Nasional

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu RPJM kesatu (2005-2009), RPJM kedua (2010-2014), RPJM ketiga (2015-2019), dan RPJM keempat (2020-2025).

Pembangunan dalam RPJM keempat (2020-2025) diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. RPJMN (2015-2019) disusun sebagai penjabaran visi, misi dan agenda pembangunan (NAWACITA) Presiden terpilih.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMN (2019-2024) melalui pelaksanaan agenda pembangunan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, maka arah kebijakan umum penanggulangan bencana adalah *mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana* yang dilaksanakan melalui strategi :

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan Daerah;
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana;
3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Sedangkan sasaran stratejik merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian program yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (Performance Plan). Adapun tujuan stratejik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur yaitu Meningkatnya kesiagaan terhadap resiko bencana.

Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Berikut ini adalah sasaran stratejik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja Hasil/Keluaran**	**Target 2024**
Meningkatnya kesiagaan terhadap resiko bencana	Indeks ketahanan daerah (IKD)	0,55 poin

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2023 disusun dengan mengacu RKPD 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 serta dengan tetap memperhatikan hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun yang lalu sehingga program dan kegiatan yang akan datang tetap berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur merencanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
     - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
     - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
   - ❖ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
     - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   - ❖ Administasi Umum Perangkat Daerah
     - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
     - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     - Fasilitasi Kunjungan Tamu
     - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
   - ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
     - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
     - Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
     - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
   - ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat

2. Program Penanggulangan Bencana yang terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
   - ❖ Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota
     - Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana)
   - ❖ Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
     - Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
   - ❖ Pelayanan peyelamatan dan evakuasi korban bencana
     - Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
     - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota
   - ❖ Penataan sistem dasar penanggulangan bencana
     - Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/ kota

Tabel T-C.33

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024
Badan penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (%)
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANAN DASAR			2.267.502.917
	URUSAN PEMERINTAHANBIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.267.502.917
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	1.967.704.317
	Perencanaan Penganggaran ,Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan data dan informasi Sektoral Urusan Perangkat Daerah	100 persen	10.999.600
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	• Jumlah Dokumen pelaksanaan forum Perangkat daerah • Jumlah dokumen renja perangkat daerah	4 Dokumen	7.499.700
	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar dan realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan Lakip, LKPJ dan LPPD	4 Laporan	1.999.900
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan dan evaluasi hasil renja	4 Laporan	1.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	1.713.205.817
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten	16 Orang/bulan	1.570.446.067
	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	10 Dokumen	140.259.900
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 Laporan	2.499.850
	Administrasi Barang Milik Daerah		100 persen	

	Pada Perangkat Daerah			1.499.850
	Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen KIB, KIR dan kodefikasi seluruh BMD pada SKPD	4 laporan	1.499.850
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	78.999.550
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic kantor	50 Paket	7.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandan	50 Paket	6.999.800
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	30 Laporan	5.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD	20 Laporan	59.999.750
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 persen	7.999.600
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	10 Laporan	999.800
	Penyediaan jasa komonikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	5.000.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4 Laporan	1.999.800
	Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah		100 persen	154.999.900
	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas operasional/lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional/lapangan	4 Unit	154.999.900
	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan perizinan alat berat	1 unit	74.999.950
B.	**Program penanggulangan bencana**		100 persen 100 persen 100 persen	299.798.600

	Pelayanan informasi Rawan Bencana kabupaten/Kota		100 persen 100 persen	21.499.700
	Sosialiasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis bencana)	Jumlah warga Negara yang diberikan sosialisasi dan gladi pengurangan resiko bencana	75 Orang	21.499.700
	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan tehadap Bencana		100 persen 100 persen	99.999.750
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana*	4 Kawasan	99.999.750
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	*Persentase jumlah korban berhasil dicari,ditolong dan dievakuasi tehadap kejadian bencana* *Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jamuntuk setiap kasus darurat bencana* *Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jamuntuk setiap kasus KLB*	100 persen 100 persen 100 persen	141.299.450
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat*	15 Dokumen	49.999.800
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang BerhasilDitemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana*	15 Orang	6.299.850
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan DistribusiLogistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	25 Orang	35.000.000
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	*Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu*	15 Dokumen	49.999.800
	Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana		100 persen 100 persen	36.999.700
	kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan Bencana kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca bencana	6 Dokumen	16.999.800
	Koordinasi penanganan Pascabencana	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai*	3 Kegiatan	19.999.900

	Kabupaten/Kota	*berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan RekontruksiPascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan*		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 merupakan inplementasi dari Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yang berisi uraian, kodefikasi, indicator dan target dari Program/ Kegiatan/sub Kegiatan, adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada BPBD adalah pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana sesuai amanat permendagri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan standar Pelayanan Minimal yang merupakan urusan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. M

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANG		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**2.267.502.917,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.267.502.917,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**2.267.502.917,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**100 Persen**			**100 Persen**	**1.967.704.317,00**	

	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	*Presentase Ketersediaan data dan informasi Sektoral Urusan Perangkat Daerah*	100 persen			100 persen	10.999.600,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen			4 Dokumen	7.499.700,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

		KEGIATAN		OPD	TAHUN 2022	2023	2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan			4 Laporan	1.999.900,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan			4 Laporan	1.500.000,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentasi Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 persen			100 persen	1.713.205.817,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan			16 Orang/bulan	1.570.446.067,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANG		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70 Laporan			18 Laporan	2.499.850,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Presentase Pencapaian Administrasi Barang Milik daerah pada perangkat daerah*	100 persen			100 persen	1.499.850,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANG		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan			4 Laporan	1.499.850,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 persen			100 persen	78.999.550,00	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket			50 Paket	7.000.000,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150 Paket			50 Paket	6.999.800,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan			30 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua

	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan			20 Laporan	59.999.750,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANG		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan			10 Laporan	999.800,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan			12 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANG		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 persen			100 persen	7.999.600,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan			10 Laporan	999.800,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan			12 Laporan	5.000.000,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 Unit			1 Unit	74.999.950,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana*** ***Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiapsiagaan terhadap bencana*** ***Jumlah warga negara yang***	**100 Persen** **100 Persen** **100 Persen**			**100 persen** **100 persen** **100 persen**	**299.798.600,00**	

	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana* *Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan*	100 persen 100 persen			100 persen 100 persen	21.499.700,00		
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)								

			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	500 Orang			75 Orang	21.499.700,00	- Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase jumlah aparatur yang ikut pelatihan.* *Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan*	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen			100 persen 100 persen	99.999.750,00		

			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	20 Kawasan			4 Kawasan	99.999.750,00	- Kab. Manggarai Timur, Poco Ranaka, Mandosawu - Kab. Manggarai Timur, Sambi Rampas, Satar Nawang - Kab. Manggarai Timur, Elar, Tiwu Kondo - Kab. Manggarai Timur, Kota Komba, Watu Nggene	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANG		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI

	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase jumlah korban berhasil dicari,ditolong dan di evakuasi tehadap kejadian bencana* *Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus darurat bencana* *Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus KLB*	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen			100 persen 100 persen 100 persen	141.299.450,00	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	5 Dokumen			15 Dokumen	49.999.800,00	-

			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500 Orang			15 Orang	6.299.850,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANG		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang			25 Orang	35.000.000,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit							
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	5 Dokumen			15 Dokumen	49.999.800,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana* *Persentase koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca bencana*	100 persen			100 persen 100 persen	36.999.700,00		
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANG		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI

			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	50 Dokumen			6 Dokumen	16.999.800,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota							
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	10 Kegiatan			3 Kegiatan	19.999.900,00	- Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 adalah merupakan rancangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam periode 1 (satu) tahun untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur menyusun Rencana Kerja tahun 2024 guna mengopersionalkan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024, khususnya terkait urusan perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun.

Tujuan daripada disusunnya Renja BPBD tahun 2024 adalah : (1) Untuk menerjemahkan dan menjabarkan Renstra Perubahan BPBD tahun 2019 – 2024, (2) Mendukung koordinasi antar instansi dalam hal penanggulangan bencana, (3) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam hal pengurangan resiko bencana, (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten
Manggarai Timur

Petrus Subin,SKM
Pembina TK.I,IV/B
NIP. 19711102000 3 1 011